



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II
TAHUN 2022

2022

LKjIP

www.pn-koba.go.id

Alamat : Jl. Gelora No 1, Komplek Perkantoran Pemkab
Bangka tengah, Kelurahan Padang Mulia,
Kecamatan Koba.

Telp/Fax: 0718-6911210

e-mail: pengadilan.negeri.koba@gmail.com

Kode Pos: 33681

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : W7-U/2113/OT.01.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKjIP Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Bangka Tengah, 13 Februari 2023
Ketua,

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Koba.

Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2022. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 9 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Koba tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO.	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata	95	100	105
			- Pidana	97	100	103
		b	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding	90	93.48	103.87
			- Kasasi	95	95.22	100.23
		c	Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
		d	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87	98.02	112.67

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO.	KINERJA UTAMA					
		e	Jumlah Putusan Yang menggunakan Keadilan Restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					104.13	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu:	100	100	100
			- Perdata			
		- Pidana	100	100	100	
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	50	1.000
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					400	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					100	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					0	

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Koba Kelas II tahun 2022 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran setelah dilakukan revisi sebesar Rp 4.853.688.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), adapun pencapaian kinerja input/ penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.696.036.329,- (99,85%) dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.750.850.000,-

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 101.745.213,- (98,94%) dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 102.838.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS	8
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
1. PENGUKURAN KINERJA	25
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	27
B. REALISASI ANGGARAN	46
C. PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	49
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA	49
BAB IV PENUTUP	51
A. SIMPULAN	51
B. REKOMENDASI	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	ii
Tabel 2. 1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024	18
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	21
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022.....	25
Tabel 3. 2. Sasaran Strategis I.....	28
Tabel 3. 3. Data Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	29
Tabel 3. 4. Data Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	31
Tabel 3. 5. Data Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	33
Tabel 3. 6. Kategori Mutu Pelayanan	34
Tabel 3. 7. Indeks Kepuasan Masyarakat	35
Tabel 3. 8. Data Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	36
Tabel 3. 9. Sasaran Strategis II.....	37
Tabel 3. 10. Daftar Perkara yang Diputus Tahun 2022	38
Tabel 3. 11. Data Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	39
Tabel 3. 12. Data Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40
Tabel 3. 13. Sasaran Strategis III.....	42
Tabel 3. 14. Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum.....	43
Tabel 3. 15. Sasaran Strategis IV	44
Tabel 3. 16. Data Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45
Tabel 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program	47
Tabel 3. 18. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja	47
Tabel 3. 19. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Capaian Sasaran Strategis I	28
Grafik 3. 2. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 1	29
Grafik 3. 3. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 1	30
Grafik 3. 4. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 2	31
Grafik 3. 5. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 2	32
Grafik 3. 6. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 3	33
Grafik 3. 7. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 4	35
Grafik 3. 8. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 5	36
Grafik 3. 9. Capaian Sasaran Strategis II	37
Grafik 3. 10. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 1	39
Grafik 3. 11. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 2	40
Grafik 3. 12. Capaian Sasaran Strategis III	42
Grafik 3. 13. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1	43
Grafik 3. 14. Capaian Sasaran Strategis IV	44
Grafik 3. 15. Capaian Sasaran Strategis IV Indikator 1	45
Grafik 3. 16. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja	48
Grafik 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Koba 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Koba yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

oleh Pengadilan Negeri Koba, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Koba mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Koba diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Koba diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri yang baru.

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Negeri Koba secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Koba adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Koba berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Koba terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Koba menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Fungsi Nasihat
Pengadilan Negeri dapat memberi nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

- 3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- 4) Fungsi Pembinaan
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

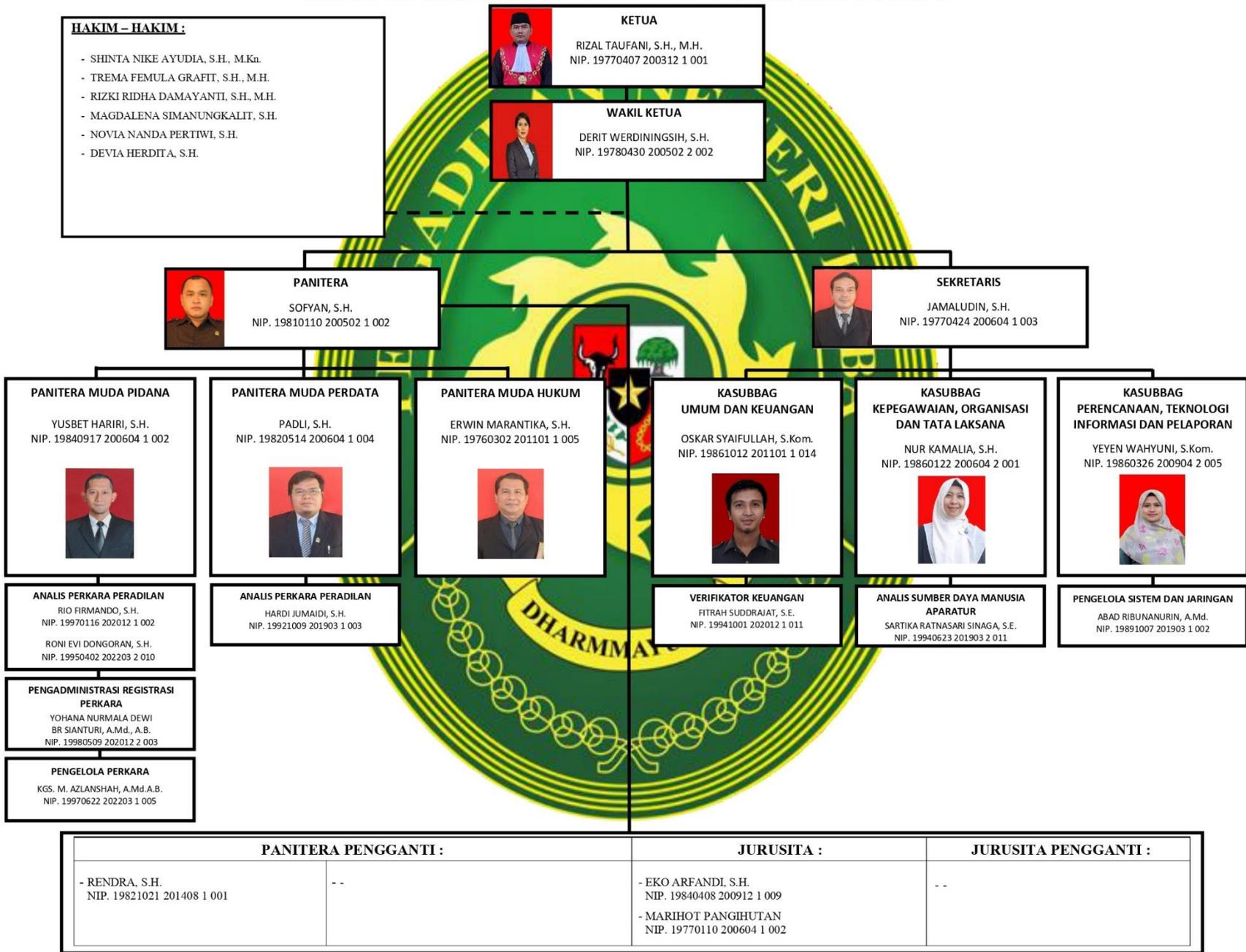
5) Fungsi Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Hukumnya;
- b. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

6) Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II



Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung, struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. Ketua
Membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua.
3. Majelis Hakim
Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepada Hakim. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. Panitera
Menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lainnya seperti membantu Majelis Hakim dalam pencatatan jalannya persidangan.
5. Sekretaris
Menyelenggarakan administrasi (kesekretariatan) membina, meneliti dan mengawasi Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan yaitu: Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, serta Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (*Supporting*) Pembinaan dukungan dibidang Administrasi.

6. Panitera Muda Perdata
Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
7. Panitera Muda Pidana
Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan Grasi.
8. Panitera Muda Hukum
Membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
9. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Membuat Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melakukan pengelolaan Website, perawatan CTS/SIPP, melakukan penghimpunan Laporan Tahunan, dan Dokumen SAKIP.
10. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan Tata Usaha dan Kearsipan.
12. Panitera Pengganti
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan membantu membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila sudah minutasi.
13. Jurusita
Melaksanakan semua perintah yang diberikan Ketua, Hakim, Panitera dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang, dan lain-lain.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koba Kelas II masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Koba adalah

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koba. Dalam pelaksanaanya pada tahun 2022 kecepatan penyelesaian perkara sudah sangat baik dan berjalan cukup efektif.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi serta mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.
- Para pencari keadilan sudah merasa putusan hakim tingkat pertama sudah cukup memenuhi rasa keadilan. Hal ini terlihat dari upaya hukum

tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan masih cenderung sangat sedikit.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Masih sedikit sekali jumlah perkara masuk ke MA dan PT pada tahun 2022 disebabkan rasa puas para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, sehingga upaya hukum banding dan kasasi yang dilakukan para pihak cenderung sangat rendah, namun demikian kegiatan untuk peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil sangat perlu dilakukan.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi sangat tinggi. Pada tahun 2022 terdapat 8 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 1.000%.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan, dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan

empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Koba masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena tidak ada anggaran yang disediakan.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba sudah sangat baik karena dapat dilihat bahwa permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Koba cenderung sedikit.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terikat dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, pelaporan, manajerial dan kepemimpinan.

Namun mengingat Pengadilan Negeri Koba yang masih sangat baru sehingga masih sangat kekurangan sekali Sumber Daya Manusia yang menyebabkan adanya aparatur yang rangkap jabatan untuk mendukung pencapaian visi misi Mahkamah Agung secara umum dan Pengadilan Negeri Koba secara khusus. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya sarana dan prasarana pendukung lancarnya kegiatan di Pengadilan Negeri Koba, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur dalam proses administrasinya karena tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koba selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara singkat rencana strategis Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koba dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

A. Pengukuran Kinerja

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan cara membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disajikan uraian pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

C. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Koba 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010 – 2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Koba yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Koba, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Koba mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan 2010 – 2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Koba diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Koba.

Visi Pengadilan Negeri Koba mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya.

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI Koba YANG AGUNG”.

Penjelasan:

- a. Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;
- b. Koba, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Koba sebagai institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Koba menguraikan dalam 4 (empat) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Koba, adalah sebagai berikut:

- 1). Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koba;**
- 2). Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
- 3). Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Koba;**
- 4). Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Koba.**

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang Agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Kelas II Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi;
- 2). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
- 3). Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan;

b. Sasaran Strategis

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Kelas II Tahun 2020-2024 adalah suatu konsep yang lebih tajam, dan hasilnya akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3). Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4). Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Utama

Empat sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Koba untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Koba dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan SIPP;
2. Penyelesaian sisa perkara pidana maupun perdata;
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Koba Kelas II. <https://pn-koba.go.id>;
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang;
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi;
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti;
9. Persentase perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap;
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan;
11. Berjalannya aplikasi PTSP+, pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, pelayanan bidang Hukum, pelayanan bidang Perdata, pelayanan bidang Pidana;
12. Berjalannya aplikasi e-Court;
13. Berjalannya aplikasi Eraterang;

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok

program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama dengan fokus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.

3). Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Koba untuk Diklat dan Pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya;
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindaklanjuti temuan-temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pengawasan Eksternal dan Internal, Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalanya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
6. Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
7. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
8. Perlu adanya pelatihan untuk petugas e-Court dan petugas PTSP.

b. Kegiatan Pokok

- 1). Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;
- 2). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- 3). Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Koba

Instansi : Pengadilan Negeri Koba
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Koba yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tabel 2. 1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	90	95	98	98
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	97	97	100	100
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	92	95	80	80
					Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5
					Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	86	87	98	98

					Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	100	100	100
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	5	5	50	50
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	50	50
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	30	20	25	25

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan.

Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba No. W7.U4/ 0010 /OT.01.2/1/2022, tanggal 03 Januari 2022 (sebagaimana terlampir).

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi
		c Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KOBA TAHUN 2022

Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 97	1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1 Koordinasi	2 Kegiatan	3.640.000
						2 Perkara Hukum Perseorangan	150 Perkara	75.198.000
						3 Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	240 Orang	24.000.000
				2 Program Dukungan Manajemen	1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1 Layanan Umum	1 Layanan	5.000.000
						2 Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.587.101.000
				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1 Layanan Sarana Internal	2 Unit		10.000.000
2 Layanan Prasarana Internal	1 Unit	219.600.000						

		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 	90 95					
		c Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5					
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87					
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	100 100					
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100					
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 97
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	90 95
		c Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
		d Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87
		e Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 100
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas kinerja yang telah selesai dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan program maupun kebijakan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Koba Kelas II terhadap pekerjaannya yang telah dilaksanakannya selama tahun 2022 dengan mengacu kepada sasaran dan target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2022 adalah sebesar 151.01%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (400%);
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (104.05%);
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (100%);
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (0%);

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
NO	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata	95	100	105
			- Pidana	97	100	103

		b	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding	90	93,48	103,87
			- Kasasi	95	95,22	100.23
		c	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5	0	0
		d	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87	98,02	112,67
		e	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I						104,13
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu: - Perdata	100	100	100
			- Pidana	100	100	100
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	50	1.000
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II						400
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III						100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV						0

Tingkat Capaian Kinerja dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :



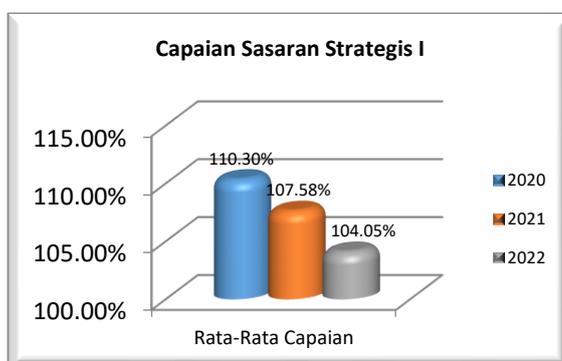
Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Koba dalam memberikan peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2022	2021	2020
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					
	1. Perdata	95	100	105	111	125
	2. Pidana	97	100	103	103	105
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:					
	1. Banding	90	93.48	103.87	109.53	110.54
	2. Kasasi	95	95.22	100.23	108.18	108.45
	c. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5	0	0	0	0
	d. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87	98.02	112.67	106.21	102.48
	e. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100	0	0
	Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				104.13	107.58

Grafik 3. 1. Capaian Sasaran Strategis I



Data pada grafik 3.1 di samping menggambarkan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel sampai dengan Tahun 2022.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

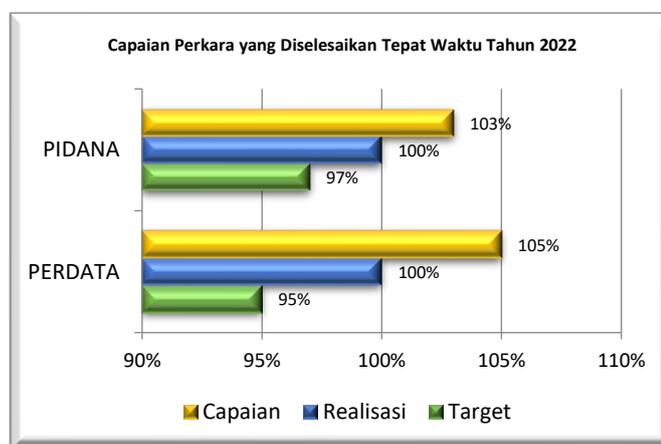
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3. Data Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata capaian
2020	Perdata	20	20	80	100	125	115%
	Pidana	2.097	2.097	95	100	105	
2021	Perdata	57	57	90	100	111	107%
	Pidana	1.847	1.847	97	100	103	
2022	Perdata	54	54	95	100	105	104%
	Pidana	176	176	97	100	103	

Grafik 3. 2. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 1



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah pidana sebesar 103% dan perdata sebesar 105%. Realisasi penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah 104%. Capaian tersebut turun sebesar 3% karena adanya kenaikan nilai target Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Meskipun turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2021, rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Koba masih terbilang bagus karena telah melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

Penyelesaian perkara tepat waktu tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan standar operasional prosedur penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dari pendaftaran perkara hingga perkara minutasasi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dalam proses percepatan penyelesaian perkara, dari perkara masuk hingga perkara minutasasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala melalui rapat bulanan.

Grafik 3. 3. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 1



Grafik di atas menunjukkan rata-rata capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, rata-rata capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami sedikit penurunan akan tetapi masih melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Untuk menghitung realisasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Grafik 3. 4. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 2



Tabel 3. 4. Data Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-rata Capaian
2020	Banding	263	11	252	90	95.82	106.47	106.55%
	Kasasi	263	5	258	92	98.10	106.63	
2021	Banding	1.903	27	1.876	90	98.58	109.53	106.31%
	Kasasi	1.903	9	1.894	92	99.53	108.18	
2022	Banding	230	15	215	90	93.48	103.87	102.05%
	Kasasi	230	11	219	95	95.22	100.23	

Grafik 3. 5. Perbandingan Capaian Sasaran I Indikator 2



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada Tahun 2022 adalah 101.82%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama.

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, akan tetapi masih melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada tahun tersebut cukup tinggi.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

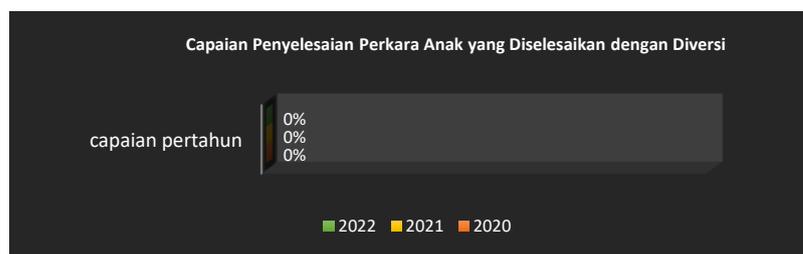
$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5. Data Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	Anak	5	0	5	0	0
2021	Anak	4	0	5	0	0
2022	Anak	3	0	5	0	0

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Grafik 3. 6. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 3



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi terhadap perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban dan terdakwa.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-4 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Koba. Survei tersebut dilakukan dengan 9 ruang lingkup yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/ Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana;
9. dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

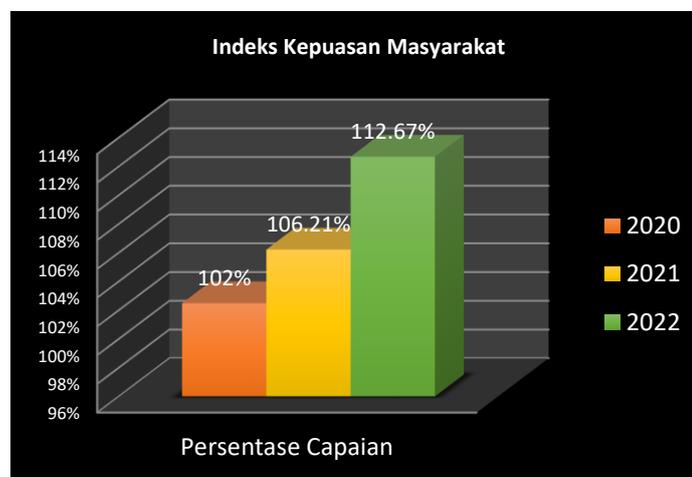
Berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Koba selama tahun 2022, bahwa Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koba sebesar **112.67%**, dengan realisasi sebesar **98.02%** telah melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan sebesar **87%**.

Tabel 3. 7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	85	87.11	102.48
2021	86	91.34	106.21
2022	87	98.02	112.67

Grafik 3. 7. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 4



Dari grafik di atas menunjukkan perbandingan capaian hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Koba Kelas II dalam periode tahun 2020, 2021 dan 2022.

Dari Grafik di atas bisa dilihat bahwa capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 112.67%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba Kelas II selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

SASARAN I : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-5 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

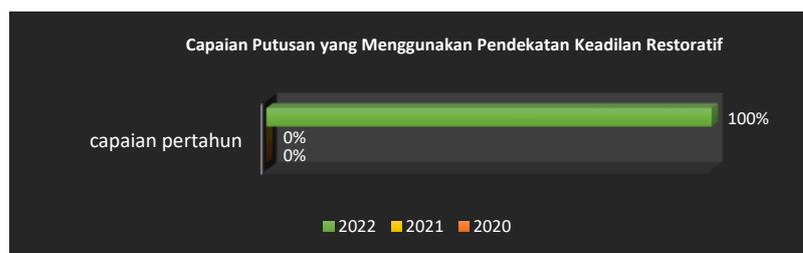
$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Tabel 3. 8. Data Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Tahun	Jumlah Perkara yang Diajukan Restoratif	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	2	2	100	100	100

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Grafik 3. 8. Capaian Sasaran Strategis I Indikator 5



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat realisasi terhadap putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.



Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Koba Kelas II dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator.

Tabel 3. 9. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2022	2021	2020
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu :	100	100	100	100	100
	- Perdata					
	- Pidana	100	100	100	100	100
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	50	1.000	500	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				400%	233%	100%

Grafik 3. 9. Capaian Sasaran Strategis II



Grafik di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu**

Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 10. Daftar Perkara yang Diputus Tahun 2022

PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2022	
JENIS PERKARA	
PERDATA	
Perdata Permohonan	8
Perdata Gugatan	30
Perdata Gugatan Sederhana	16
Perdata Konsinyasi	0
JUMLAH	54
PIDANA	
Pidana Biasa	169
Pidana Singkat	0
Pidana Cepat	2
Pidana Anak	5
Lalu Lintas	1.607
Praperadilan	0
JUMLAH	1.783

Tabel 3. 11. Data Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang Di minutasi dan Dikirim Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian
2020	Perdata	65	65	100	100	100	100%
	Pidana	2.097	2.097	100	100	100	
2021	Perdata	57	57	100	100	100	100%
	Pidana	1.847	1.847	100	100	100	
2022	Perdata	54	54	100	100	100	100%
	Pidana	1.783	1.783	100	100	100	

Grafik 3. 10. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 1



Jumlah perkara perdata yang diputus pada tahun 2022 berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) perkara, dan untuk pidana berjumlah 1.783 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga) perkara. Semua isi putusan tersebut telah diminutasi dan disampaikan ke para pihak tepat waktu. Sehingga capaian salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah 100%.

Grafik di atas menunjukkan perbandingan rata-rata capaian selama 3 tahun terakhir dengan nilai persentase rata-rata capaian pada tahun 2022 sebesar 100%, artinya bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Koba telah di minutasi dan disampaikan ke para pihak dengan tepat waktu.

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

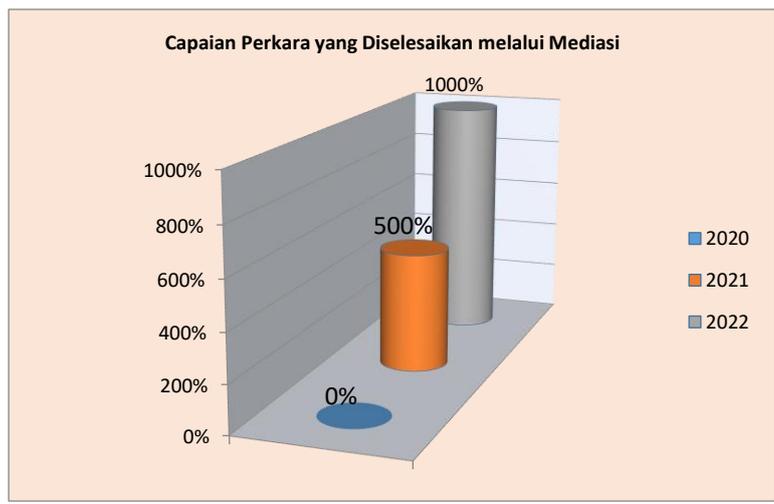
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 3. 12. Data Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	3	0	2	0	0
2021	8	2	5	25	500
2022	16	8	5	50	1.000

Grafik 3. 11. Capaian Sasaran Strategis II Indikator 2



Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 50%, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 5%. Sehingga capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 sebesar 1.000%.

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasikan dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3. 13. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
				2022	2021	2020
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100	100	100

Grafik 3. 12. Capaian Sasaran Strategis III



Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III Tahun 2022 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis III ini akan diuraikan sebagai berikut:

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi,

konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

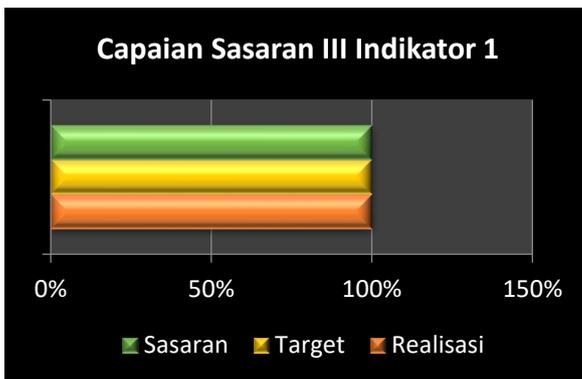
Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan yakni dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dalam penyelenggaraan sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Tabel 3. 14. Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	42	42	100	100	100
2021	15	15	100	100	100
2022	46	46	100	100	100

Grafik 3. 13. Capaian Sasaran Strategis III Indikator 1



Dari grafik di samping terlihat bahwa capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Tahun 2022 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Koba telah berhasil menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3. 15. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	0	0	333	0
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				0	333	0

Grafik 3. 14. Capaian Sasaran Strategis IV



Capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV Tahun 2022 adalah 0%. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

SASARAN IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang
Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti. Realisasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} \times 100\%$$

Tabel 3. 16. Data Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	0	0	20	0	0
2021	1	1	30	100	333
2022	0	0	20	0	0

Grafik 3. 15. Capaian Sasaran Strategis IV Indikator 1



Grafik di atas merupakan rincian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri Koba. Capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2022 sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan cukup tinggi sehingga tidak adanya permohonan eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Koba yang menyebabkan tidak ada realisasi terhadap indikator kinerja Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Pengadilan Negeri Koba tidak mendapatkan anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara. Oleh karena itu di Pengadilan Negeri Koba tidak ada perkara yang diajukan untuk pembebasan biaya perkara.

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Koba tidak memiliki Zitting Plaats yang digunakan untuk sidang di luar gedung pengadilan, sehingga untuk tahun 2022 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk sidang di luar gedung pengadilan.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Koba tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), telah direalisasikan sebesar Rp. 23.900.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan persentase 99,58%).

2. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022

Pada awal Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Koba mendapatkan pagu sebesar Rp. 4.924.539.000,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas;

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.821.701.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah*);

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 102.838.000,- (*Seratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Namun pada pertengahan tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Koba melakukan revisi anggaran, sehingga pagu pada Pengadilan Negeri Koba per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.853.688.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.750.850.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 102.838.000,- (*Seratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Laporan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2021 per program adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

No	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	4.821.701.000	4.750.850.000	4.696.036.329	99.85%	54.813.671
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	102.838.000	102.838.000	101.745.213	98.94%	1.092.787
TOTAL		4.924.539.000	4.853.688.000	4.797.781.542	98.85%	55.906.458

3. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Koba tahun 2022, rincian pagu awal, pagu akhir, realisasi dan sisa anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

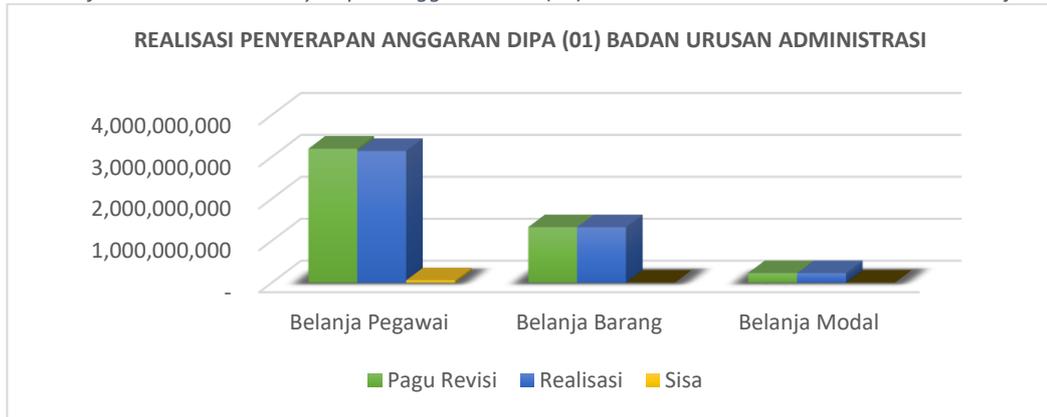
1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Laporan realisasi penyerapan anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja

No	BELANJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.321.088.000	3.196.088.000	3.141.847.030	98.30%	54.240.970
2.	Belanja Barang	1.271.013.000	1.325.162.000	1.324.616.299	99.96%	545.701
3.	Belanja Modal	229.600.000	229.600.000	229.573.000	99.99%	27.000
TOTAL		4.821.701.000	4.750.850.000	4.696.036.329	99.85%	54.813.671

Grafik 3. 16. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Per Jenis Belanja



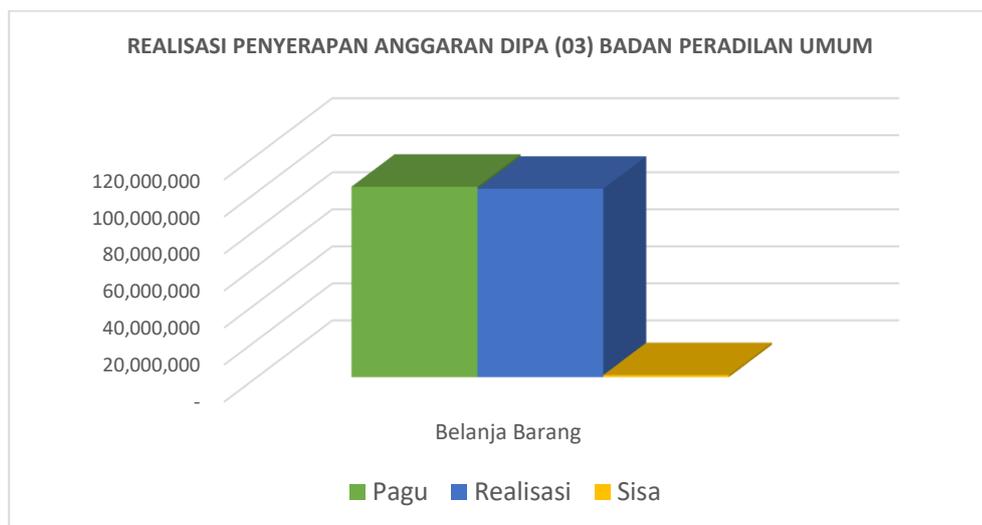
2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu, realisasi dan sisa anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja

No	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang	102.838.000	101.745.213	98.94%	1.092.787
TOTAL		102.838.000	101.745.213	98.94%	1.092.787

Grafik 3. 17. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Per Jenis Belanja



C. PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2022 secara garis besar mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh unsur yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Koba yaitu melayani dengan semboyan kerja “SIGAP”: Santun, Inovatif, Giat, Akuntabel dan Prima yang merupakan motto Pengadilan Negeri Koba.

Namun hal ini dapat lebih dioptimalkan tanpa adanya sumber daya manusia yang rangkap jabatan, sehingga jika ditambah lagi SDM yang sesuai dengan Analisa Beban Kerja jabatan yang dibutuhkan maka tidak dipungkiri peningkatan kinerja yang lebih signifikan akan terjadi.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Koba telah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia berdasarkan analisa beban kerja dan hasilnya masih belum sesuai. Berikut rincian beban perkara per 31 Desember 2022:

- Beban Perkara Perdata : 54 perkara (perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan);
- Beban Perkara Pidana : 176 perkara (tanpa perkara pidana lalu lintas).

Dari data di atas, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba telah memeriksa dan mengadili sebanyak 230 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariatan maka jumlah perkara sejumlah tersebut di atas tidaklah sebanding dengan jumlah Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Koba. Terlihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap tugas bagian lain. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Koba membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia.

Adapun jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Koba sesuai Analisa Jabatan terakhir yang telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Hakim berupa:
 - Hakim sejumlah 5 orang.
2. Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional berupa:
 - Panitera Pengganti sejumlah 15 orang;
 - Jurusita sejumlah 1 orang;
 - Jurusita Pengganti sejumlah 6 orang.
3. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi Kepaniteraan:
 - Analisis Perkara Peradilan sejumlah 3 orang;
 - Pengelolaan Data Informasi dan Hukum sejumlah 2 orang;
 - Bendahara (Kepaniteraan) sejumlah 1 orang;
4. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi Kesekretariatan:
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sejumlah 2 orang;
 - Analisis SDM Aparatur sejumlah 1 orang;
 - Pengelola Sistem dan Jaringan sejumlah 1 orang;
 - Bendahara (Kesekretariatan) sejumlah 1 orang;
 - Pengelola Kepegawaian sejumlah 1 orang;
 - Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur sejumlah 1 orang;
 - Pengadministrasi Persuratan sejumlah 2 orang;
 - Penyusunan Laporan Keuangan sejumlah 1 orang;
 - Pengelola BMN sejumlah 1 orang;
 - Pranata Barang dan Jasa sejumlah 1 orang;
 - Teknis Sarana dan Prasarana sejumlah 2 orang;
 - Ajudan sejumlah 2 orang.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Koba tahun 2022 dan bisa dibandingkan di beberapa sasaran strategis dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing - masing sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2022 ini sudah sangat baik. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan maupun hambatan atau masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Koba dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perkara perdata dan layanan peradilan lainnya. Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, persentase capaian rata-rata kinerja Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2022 adalah sebesar 151.03%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (400%);
- 2). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (104.13%);
- 3). Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (100%);
- 4). Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (0%);

Selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan tugasnya dalam hal pelaksanaan administrasi umum untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, seperti pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Adapun penyerapan anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang berhasil direalisasikan oleh Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.696.036.329,- (Empat milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.750.850.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Penyerapan anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) yang berhasil direalisasikan oleh Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 101.745.213,- (Seratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 98,94% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 102.838.000,- (Seratus dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

2. Hambatan/ Masalah

Secara keseluruhan rata-rata capaian di Pengadilan Negeri Koba telah melampaui 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sasaran yang telah melampaui target. Namun demikian masih dijumpai beberapa sasaran yang belum memenuhi target, yaitu indikator kinerja untuk perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, dan indikator kinerja untuk putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Hambatan selanjutnya yaitu sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya dalam laporan bahwa Pengadilan Negeri Koba masih kekurangan SDM baik hakim maupun pegawai. Sehingga beberapa pegawai masih mengerjakan tugas jabatan lain yang tidak sesuai dengan jabatan pegawai itu sendiri.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Koba, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan ditahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Koba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

Terkait pengelolaan pegawai, agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Koba sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang setiap tahun telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

REKAPITULASI DATA PERKARA

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	4	0	0	3	7	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	6
2	Februari	6	0	0	0	6	3	3	0	3	0	0	3	0	3	0	3
3	Maret	3	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	April	7	0	0	3	10	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5
5	Mei	5	0	0	3	8	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	5
6	Juni	5	0	0	2	7	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3
7	Juli	3	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
8	Agustus	3	0	0	4	7	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	4
9	September	4	0	0	1	5	3	0	0	2	0	0	3	0	3	0	2
10	Oktober	2	0	0	4	6	1	2	0	3	0	0	1	0	1	0	5
11	November	5	0	0	4	9	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	6
12	Desember	6	0	0	2	8	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	5
TOTAL					31		30		0	12	0	0			30		

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Maret	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
9	September	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1
10	Oktober	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1
11	November	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					8		8		0	0	0	0			8		

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

LAPORAN REKAPITULISASI PERKARA GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN NEGERI KOBA
2022

No	Periode	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus	Status Penyelesaian Perkara				Jenis Kelamin	
				Akta Perdamaian	Penetapan Dismissal	Penetapan Gugur	Putusan	Laki - Laki	Perempuan
1	Januari	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Februari	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	-	1	1
4	April	3	3	-	-	-	3	3	3
5	Mei	-	1	-	-	-	1	-	-
6	Juni	1	-	-	-	-	-	1	1
7	Juli	-	1	-	-	-	1	-	-
8	Agustus	1	-	-	-	-	-	1	1
9	September	-	1	-	-	-	1	-	-
10	Oktober	2	-	-	-	-	-	2	2
11	November	5	3	-	-	-	3	4	4
12	Desember	2	6	-	-	-	6	1	2
TOTAL		16	16	-	-	-	16	13	15

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
 PENGADILAN NEGERI KOBA
 Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1
3	Maret	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	2	2	2	0	2	2	0	0	4	2
11	November	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1
12	Desember	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1
Total			5		5			5			14	7

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
 PENGADILAN NEGERI KOBA
 Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	14	10	24	13	1	13	13	0	11	44	33
2	Februari	11	10	21	9	2	9	9	0	12	51	37
3	Maret	12	7	19	11	0	11	11	0	8	47	36
4	April	8	15	23	7	0	7	7	0	16	56	41
5	Mei	16	5	21	5	0	5	5	0	16	56	41
6	Juni	16	12	28	18	0	18	18	0	10	74	54
7	Juli	10	18	28	12	1	12	12	0	16	77	57
8	Agustus	16	12	28	21	1	21	21	0	7	64	50
9	September	7	16	23	10	0	10	10	0	13	48	37
10	Oktober	13	20	33	18	1	18	18	0	15	64	48
11	November	15	33	48	14	0	14	14	0	34	121	79
12	Desember	34	12	46	31	0	31	31	0	15	142	91
Total			170		169			169			844	604

REKAPITULASI PERKARA PIDANA SINGKAT
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0		0			0			0	0

REKAPITULASI PERKARA PIDANA CEPAT
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	1	0	1	1	0	0	4	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			2		2			2			5	0

REKAPITULASI PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
PENGADILAN NEGERI KOBA
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	96	96	96	0	96	96	0	0	288	96
2	Februari	0	59	59	59	0	59	59	0	0	177	59
3	Maret	0	19	19	19	0	19	19	0	0	57	19
4	April	0	161	161	161	0	161	161	0	0	483	161
5	Mei	0	74	74	74	0	74	74	0	0	222	74
6	Juni	0	145	145	145	0	145	145	0	0	435	145
7	Juli	0	37	37	37	0	37	37	0	0	111	37
8	Agustus	0	319	319	319	0	319	319	0	0	957	319
9	September	0	291	291	291	0	291	291	0	0	873	291
10	Oktober	0	263	263	263	0	263	263	0	0	789	263
11	November	0	143	143	143	0	143	143	0	0	429	143
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1607		1607			1607			4821	1607

LAMPIRAN 2
RAPAT PENETAPAN DOKUMEN
PERENCANAAN KINERJA OLEH
SEMUA UNIT DALAM SATUAN
KERJA



PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

JL. GELORA NO 1 KOMP. PERKANTORAN PEMKAB BANGKA TENGAH
KEL. PADANG MULYA KEC. KOBA,
TELP/FAX. (0718) 6911210 BANGKA TENGAH 33681
email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com - website: www.pn-koba.go.id

Nomor : W7.U4/01/KP.01.2/1/2023

Koba, 03 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba.

Kepada

Yth 1. Ketua & Wakil Ketua
2. Panitera & Sekretaris
3. Panmud & Kasubbag
Pada Pengadilan Negeri Koba
Di Koba

Dengan Hormat,

Diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023

Jam : 15.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
 YEYEN WAHYUNI, S.Kom. NIP.19860326 200904 2 005	 JAMALUDIN, S.H. NIP.19770424 200604 1 003

NB :

Bagi bapak/ibu /Pegawai yang berhalangan hadir dapat menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Koba 1(satu) hari sebelum rapat dilaksanakan.

	PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II	Nomor	: W7.U4/
		Revisi	: 00
	FORM NOTULEN RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023	Tanggal	04 Januari 2023
	Jl. Gelora No. 1, Padang Mulya - Koba	Halaman	: 1 of 2

HARI/TANGGAL	Rabu, 04 Januari 2023			
LOKASI	Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba		<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU	15.00 WIB	AKHIR RAPAT	16.30 WIB	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	FORM NOTULEN RAPAT PENETAPAN IKU, RKT, PKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023			
PIMPINAN RAPAT	1	RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.		
MODERATOR	2	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.		
NOTULEN	3	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.		

BAHASAN MATERI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
<p>Rabu, 04 Januari 2023, bertempat di ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba telah dilaksanakan rapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023. Kegiatan rapat tersebut dibuka oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Koba, Yeyen Wahyuni, S.Kom.</p> <p>Dalam rapat ini dibahas terkait penyusunan Dokumen SAKIP sebagai mana yang telah disampaikan dalam surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : W7-U/2113/OT.01.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.</p> <p>Dalam rapat ini, Ketua Pengadilan Negeri Koba beserta seluruh tim penyusunan dokumen sakiip melakukan koordinasi terkait indikator apa saja yang akan dituangkan dalam IKU Pengadilan Negeri Koba tahun anggaran 2023.</p> <p>Setelah indikator tersusun kedalam IKU, langkah selanjutnya menentukan target yang akan dicapai Pengadilan Negeri Koba terhadap masing-masing Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan dituangkan kedalam reuiu Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023.</p> <p>Target masing-masing indikator dapat dirincikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu = 98 • Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu = 100 	

- Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding = 90
- Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi = 80
- Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi = 5
- Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan = 98
- Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif = 100
- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu = 100
- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu = 100
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi = 50
- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan = 50
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) = 100
- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) = 25

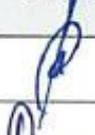
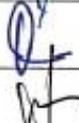
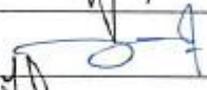
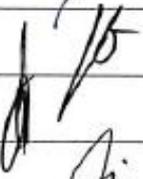
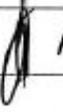
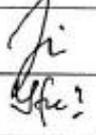
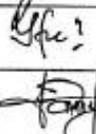
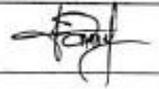
Seluruh data tersebut direkap oleh bagian PTIP, dan diinput kedalam aplikasi Komdanas. Selanjutnya PTIP segera menyiapkan dokumen-dokumen SAKIP berdasarkan data diatas, dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi paling lambat tanggal 14 Februari 2023.

PEMBUAT NOTULEN		DIPERIKSA (MR)		DISAHKAN (PIMPINAN)	
NAMA LENGKAP & TTD		NAMA LENGKAP & TTD		NAMA LENGKAP	
ABAD RIBUNANURIN, A.Md.		JAMALUDIN, S.H		RIZAL TAUFANI, S.H.,M.H.	
				TANDA TANGAN	
					

	Pengadilan Negeri Koba Kelas II	Nomor	W7.U4/ /
		Revisi	00
	FORM DAFTAR HADIR RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA, RENCANA KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023	Tanggal	04 Januari 2023
	Jl. Gelora No. 1 Kel. Padang Mulya - Koba	Halaman	1 of 1

Tanggal : 04 Januari 2023

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba

No.	Nama	Bagian	Tandatangan
1	Pibae Pautani	KRM.	
2	DERIT. W	WKPN	
3	Sopjan	PAMITEPA	
4	Jamrudin	Secretaris	
5	YUSBER HARIN	PANMUD PIDANA	
6	Enas Maranife	Panandliton	
7	Palli	Panmod perdak	
8	Ostre	Kasubumam Kuangan	
9	Nurkamali	Kasubbag kepyawan	
10	Yeyen. w	Kasubag PTIP	
11	Abad R	PTIP	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Rapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023



LAMPIRAN 3
PEMANTAUAN CAPAIAN
KINERJA SECARA BERKALA
MELALUI APLIKASI KOMDANAS

- Pemantauan capaian kinerja per bulan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum melalui aplikasi KOMDANAS.

KOMDANAS MA-RI
Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

[Login/Logout](#) Formulir login/logout |
 [Utama](#) Halaman Utama |
 [Perencanaan](#) |
 [Berita](#) Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2022

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

% melebihi target bulanan |
 % sesuai target bulanan |
 % di bawah target bulanan |
 % capaian nol |
 - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PN Koba Bangka Belitung	128,62%	112,54%	128,62%	144,69%	128,62%	117,77%	114,94%	128,62%	128,62%	112,54%	128,62%	110,81%	Edit

YOU ARE HERE: [HOME](#) ▶ [PERENCANAAN](#) ▶ [E-SAKIP](#) ▶ LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULANAN [TOP](#)

LAMPIRAN 4
MONITORING CAPAIAN KINERJA
KUMULATIF PER TRIWULAN

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2022

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif % sesuai target kumulatif % di bawah target kumulatif % capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKIP
1.	Pengadilan Negeri Koba Bangka Belitung	100,33%	103,28%	97,83%	98,53%	Unduh Draft LKIP



PENGADILAN NEGERI KOPA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2022

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN NEGERI KOB

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	7	7	105,26	16	16	105,26	12	12	105,26	19	19	105,26
					100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
2.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00
					0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	



PENGADILAN NEGERI KOBA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

3.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	34	34 100,00%	103,09	32	32 100,00%	103,09	43	43 100,00%	103,09	67	67 100,00%	103,09
4.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0 0,00%	0,00	2	2 100,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	0	0 0,00%	0,00	22	22 100,00%	111,11	0	0 0,00%	0,00	32	31 96,88%	106,67



PENGADILAN NEGERI KOPA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		0	0	0,00	22	22	0,00	0	0	0,00	32	30	0,00
					0,00%			100,00%			0,00%			93,75%	
7.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0	0,00	0	46	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0	0,00	0	0	0,00	10	0	0,00	0	0	0,00
					0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	



PENGADILAN NEGERI KOBA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	2	1	1.000,00	4	3	1.500,00	2	0	0,00	2	4	4.000,00
					50,00%			75,00%			0,00%		200,00%		
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	34	34	100,00	32	32	100,00	43	43	100,00	67	67	100,00
					100,00%			100,00%			100,00%		100,00%		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	7	7	100,00	16	16	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00
					100,00%			100,00%			100,00%		100,00%		



PENGADILAN NEGERI KOPA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,
Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210
Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681
e-mail : pengadilan.negerikoba@gmail.com

12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
						0,00%			0,00%			0,00%			0,00%



PENGADILAN NEGERI KOPA

Jalan Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah,

Kecamatan Koba Telp. (0718) 6911210 Fax. (0718) 6911210

Bangka Tengah - Bangka Belitung - 33681

e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	<i>Rp. 4.521.250.000</i>
2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	<i>Rp. 229.600.000</i>
3	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>	<i>Rp. 102.838.000</i>

LAMPIRAN 5
RAPAT PENGUMPULAN DATA
KINERJA



PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

JL. GELORA NO 1 KOMP. PERKANTORAN PEMKAB BANGKA TENGAH
KEL. PADANG MULYA KEC. Koba,
TELP/FAX. (0718) 6911210 BANGKA TENGAH 33681
email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com - website: www.pn-koba.go.id

Nomor : W7.U4/ 05.a /KP.01.2/1/2023

Koba, 25 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Pengumpulan Data LKjIP
Tahun 2022.

Kepada

Yth 1. Ketua & Wakil Ketua
2. Panitera & Sekretaris
3. Pejabat Kepaniteraan & Kesekretariatan
Pada Pengadilan Negeri Koba
Di Koba

Dengan Hormat,

Diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pengumpulan Data LKjIP Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba yang akan diselenggarakan pada :

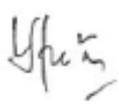
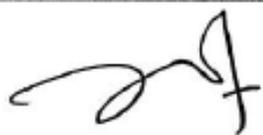
Hari/Tanggal : Kamis / 26 Januari 2023

Jam : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
 <u>YEYEN WAHYUNI, S.Kom.</u> NIP.19860326 200904 2 005	 <u>JAMALUDIN, S.H.</u> NIP.19770424 200604 1 003

NB :

Bagi bapak/Ibu /Pegawai yang berhalangan hadir dapat menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Koba 1(satu) hari sebelum rapat dilaksanakan.

	PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II		Nomor	: W7.U4/
			Revisi	: 00
	FORM NOTULEN PENGUMPULAN DATA LKJIP TAHUN 2022		Tanggal	26 Januari 2023
			Jl. Gelora No. 1, Padang Mulya - Koba	

HARI/TANGGAL	Kamis, 26 Januari 2023			
LOKASI	Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba		<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU	14.00 WIB	AKHIR RAPAT	16.00 WIB	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	FORM NOTULEN RAPAT PENGUMPULAN DATA LKJIP TAHUN 2022			
PIMPINAN RAPAT	1	RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.		
MODERATOR	2	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.		
NOTULEN	3	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.		

BAHASAN MATERI	
<p>Kamis, 26 Januari 2023, di ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba telah dilaksanakan rapat pengumpulan data LKjIP tahun 2022. Kegiatan rapat tersebut dibuka oleh kepala sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Koba, Yeyen Wahyuni, S.Kom.</p> <p>Dalam rapat ini dibahas terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai mana yang telah disampaikan dalam surat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor W7.U/2113/OT.01.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyusunan Dokumen SAKIP.</p> <p>Dalam rapat ini, ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi surat diatas. Terkait dalam hal data dukung bagian kepaniteraan segera dikumpulkan oleh kepaniteraan hukum dan diserahkan kepada sub bagian PTIP.</p> <p>Kepaniteraan hukum dalam hal ini bertanggungjawab untuk pengumpulan data keadaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta pengumpulan data penyelesaian perkara sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Data perkara kemudian di rekap, dan diserahkan ke bagian PTIP paling lambat tanggal 3 Februari 2023 agar segera di rekap oleh bagian PTIP.</p> <p>Sub bagian kepegawaian mengumpulkan data terkait Sumber Daya Manusia. Laporan tersebut segera ditindak lanjuti dan dikumpulkan pada sub bagian PTIP. Untuk bagian umum dan keuangan segera mengumpulkan data terkait pengelolaan keuangan beserta penyerapan DIPA 01, DIPA 03 dan</p>	

segera dikumpulkan kepada sub bagian PTIP. Pengumpulan data paling lambat tanggal 3 Februari 2023.

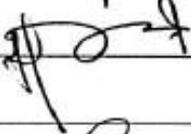
Untuk bagian PTIP bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan dari informasi atau dokumen yang telah diberikan oleh masing-masing bagian. Laporan tersebut paling lambat dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Februari 2023.

PEMBUAT NOTULEN		DIPERIKSA (MR)		DISAHKAN (PIMPINAN)	
NAMA LENGKAP & TTD		NAMA LENGKAP & TTD		NAMA LENGKAP	
ABAD RIBUNANURIN, A.Md.		JAMALUDIN, S.H		RIZAL TAUFANI, S.H.,M.H.	
				TANDA TANGAN	
					

	Pengadilan Negeri Koba Kelas II	Nomor	W7.U4/ /
		Revisi	00
	FORM DAFTAR HADIR RAPAT PENGUMPULAN DATA LKJIP	Tanggal	26 Januari 2023
	Jl. Gelora No. 1 Kel. Padang Mulya - Koba	Halaman	1 of 1

Tanggal : 26 Januari 2023

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Koba

No.	Nama	Bagian	Tandatangan
1	Acad P	KRM	
2	DERIT W	WKPN	
3	Afyan	PAWITERS	
4	Jamaludin	Sekretaris	
5	XUSNET	panas purna	
6	Erwin Marantika	Panmas HUKUM	
7	Padli	Panmas Perdata	
8	Yeyen. w	Kasubbag PTIP	
9	Nurkamalia	Kasubbag kepegawaian	
10	Oskar	Kasubbag Urusan Keuangan	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Rapat Pengumpulan Data LKjIP Tahun 2022



LAMPIRAN 6
PENGUMPULAN DAN
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
TELAH MEMANFAATKAN APLIKASI
KOMDANAS

PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2022

Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi STIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 95%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	<input type="text" value="3"/>	catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="3"/>	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	<input type="text" value="21"/>	catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="21"/>	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 5%	
		Jumlah Perkara Diversi	<input type="text" value="1"/>	catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
		Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	<input type="text" value="0"/>	
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target : 100%	
		Perkara yang diajukan untuk restoratif	<input type="text" value="0"/>	
		Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	<input type="text" value="0"/>	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Target : 100%	
		Jumlah Putusan	<input type="text" value="3"/>	catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
		Jumlah Salinan Putusan yang di minutasai dan dikirim tepat waktu	<input type="text" value="3"/>	

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2022

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

■ % melebihi target bulanan
 ■ % sesuai target bulanan
 ■ % di bawah target bulanan
 ■ % capaian nol
 ■ tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PN Koba Bangka Belitung	128,62%	112,54%	128,62%	144,69%	128,62%	117,77%	114,94%	128,62%	128,62%	112,54%	128,62%	110,81%

LAMPIRAN 7

SK TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI KOKA
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOKA
NOMOR : W7.U4/0016 .a/OT.01.2/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI KOKA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOKA

- Menimbang** : 1. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2887/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: W7.U/2113/OT.01.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator dan Anggota;
3. bahwa Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2877/SEK /OT.1.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor W7.U/2113/OT.01.2/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI Koba Kelas II.
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II.
- KEDUA** : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : KOBA
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,**


(RIZAL TAUFANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA
NOMOR : W7.U4/0016.4/OT.01.2/1/2023
TANGGAL : Januari 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN
2022 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2023 PADA PENGADILAN NEGERI KOBA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RIZAL TAUFANI, S.H.,M.H.	KETUA	PEMBINA DAN KETUA
2.	SOFYAN, S.H.,M.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
3.	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
4.	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
5.	YUSBET HARIRI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
6.	PADLI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
7.	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
8.	NUR KAMALIA, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9.	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
10.	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	STAF PTIP	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : KOBA
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,


RIZAL TAUFANI

LAMPIRAN 8
PENGUKURAN KINERJA
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN
REWARD/PUNISHMENT



PENGADILAN NEGERI Koba

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

Nomor: W7.U4/ ~~0888~~ /SK/KP 04.6/6/2022

TENTANG

TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT

PADA PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor:W7.U4/0464.a/SK/KP.04.6/3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Koba;
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan Dedikasi, Kerja Keras dan Disiplin serta Kontribusi terbaik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Koba perlu pemberian Penghargaan (Reward) kepada pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Koba ;
2. bahwa untuk pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai perlu ditetapkan Kriteria Penilaian dan bentuk penghargaan ;
3. bahwa oleh karena adanya Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 127/KMA/SK/IV/2021 tanggal 18 April 2022 atas nama atas **Rahardhi Perdana S.H.,M.H** dari **Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Koba menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Sofyan,S.H** dari **Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjadi Panitera Pengadilan Negeri Koba**, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba;
4. bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan

Reward dan Punishment, maka perlu dibentuk tim pada Pengadilan Negeri Koba ;

5. bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibuatkan surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan dibawahnya ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring Reformasi Birokrasi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor: W7.U4/ 0464.a/ SK/KP.04.6/3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Koba.
- Kedua : Menetapkan Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Koba sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai

yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh :

- a. Ditetapkan sebagai pegawai terbaik dengan menerima Piagam Penghargaan ;
 - b. Untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka nilai akhir Tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan akan berpengaruh pada unsur Perilaku Kerja sedangkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diberikan tambahan nilai pada penilaian kinerja Tahunan dan terkait dengan kebijakan kontrak kerja tahunan ;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Tim yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba ;
 3. Unsur yang dinilai antara lain :
 - a) Menerapkan kode etik pegawai, dan standar pelayanan ;
 - b) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja dan melaksanakan tugas ;
 - c) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 - d) Tingkat kepekaan / respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 4. Penghargaan diberikan dalam kegiatan Apel Pagi / Sore atau Rapat Bulanan atau kegiatan-kegiatan lainnya ;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 15 Juni 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,

ARIZAL TAUFANI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : W7.U4/0888/SK/KP 04.6/6/2022
Tanggal : 15 Juni 2022

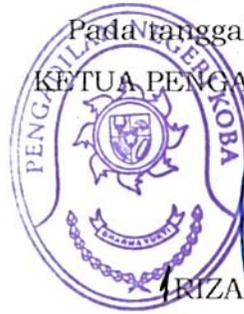
**TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERIT WERDININGSIH,S.H	WAKIL KETUA	KETUA TIM
2	SHINTA NIKE AYUDIA,S.H.,M.Kn.	HAKIM	ANGGOTA
3	SOFYAN,S.H.	PANITERA	ANGGOTA
4	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	ANGGOTA
5	NUR KAMALIA, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	SEKRETARIS

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 15 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,



IRIZAL TAUFANI



PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

JL. GELORA NO. 1 KOMPLEK PERKANTORAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, PADANG MULIA, Koba
TELP/FAX. (0718) 6911210 BANGKA TENGAH 33681
email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com - website: www.pn-koba.go.id

Koba, 30 November 2022

Nomor : W7.U4/ /1.1/12/2022

Perihal : Undangan

Lampiran : -

Kepada :

Yth. Tim Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan Honorer Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Di- Pengadilan Negeri Koba

Dengan Hormat,

Bahwa Bapak/Ibu diharapkan untuk menghadiri Rapat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer Pengadilan Negeri Koba yang akan diselenggarakan pada:

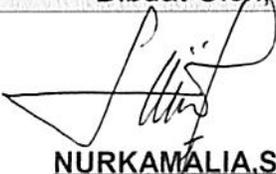
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022

Jam : 15.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Koba

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dibuat Oleh,	Disetujui oleh,
 NURKAMALIA.S.H. NIP.198601222006042001	 DERIT.WERDININGSIH.S.H. NIP. 19780430 200502 2 002

NB :

- Bagi bapak/Ibu yang berhalangan hadir dapat menyampaikan kepada Ketua Tim 1 (satu) hari sebelum

	Pengadilan Negeri Koba Kelas II	Nomor	W7.U4/ /
		Revisi	00
	Form Daftar Hadir Rapat Berjenjang Kesekretariatan Bulan November Tahun 2022	Tanggal	1 Desember 2022
	Jl. Gelora No.1 Komplek Perkantoran Pembkab Bangka Tengah Kel. Padang Mulia Kec. Koba	Halaman	1 of 1

Tanggal : 1 Desember 2022

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Koba

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	DERIT.W	WKPN	
2	SOFJAN	PAMTERA	
3	Jamaludin	Sekretaris	
4	Nurkamalia	kasubbag kepegawaian	

BERITA ACARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI TERBAIK
PERIODE NOVEMBER 2022
PENGADILAN NEGERI KOBA

Pada hari ini, Kamis, 1 November 2022, jam 15.00 WIB bertempat di ruang rapat Pengadilan Negeri Koba, Tim Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba dengan susunan tim berikut ini :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. DERIT WERDININGSIH, S.H. | sebagai Ketua |
| 2. SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn. | sebagai Anggota |
| 3. SOFYAN, S.H. | sebagai Anggota |
| 4. JAMALUDIN, S.H. | sebagai Anggota |
| 5. NURKAMALIA, S.H. | sebagai Sekretaris |

Selanjutnya Tim melaksanakan pemilihan Pegawai Terbaik periode November 2022 yang diawali oleh ketua tim memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota tim untuk mengajukan nama-nama pegawai terbaik yang dinilai memenuhi kriteria yang telah disepakati.

Ketua tim mengingatkan kembali bahwa unsur-unsur yang menjadi kriteria dalam menentukan pegawai terbaik adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian Prestasi Kerja Pegawai terdiri dari :

1. Kedisiplinan
2. Prestasi Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Kejujuran
5. Kerjasama
6. Kebersihan
7. Komunikasi

Kemudian masing-masing anggota tim mengajukan nama-nama yang dinilai memenuhi kriteria tersebut di atas sehingga diperoleh 2 nama yaitu sebagai berikut :

Nama-nama yang memenuhi kriteria sebagai pegawai terbaik yaitu :

1. RONI EVI DONGORAN, S.H
2. YOHANA NURMALA DEWI, Amd.A.B

Selanjutnya dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim (penilaian terlampir) terpilih 2 nama dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. RONI EVI DONGORAN, S.H. dengan jumlah nilai 4210
2. YOHANA NURMALA DEWI, Amd.A.B. dengan jumlah nilai 4100

Dari hasil penilaian tim maka diperoleh pegawai terbaik periode November 2022 yaitu Sdri. RONI EVI DONGORAN, S.H. dengan perolehan nilai 4210

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilaian Prestasi Kerja dan Reward;

ANGGOTA



SOFYAN, S.H.,M.H

KETUA



DERIT WERDININGSIH, S.H.

ANGGOTA



JAMALUDIN, S.H.

SEKRETARIS



NURKAMALIA, S.H.

**RAPAT PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) PADA PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE
NOVEMBER 2022**



**NOVEMBER 2022 KEPADA HAKIM, PANITERA PENGGANTI,
DAN PEGAWAI TERBAIK**



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : Roni Evi Dongoran, S.H.
 Jabatan/Bagian : Analis Perkara Peradilan
 Pendidikan : S1
 Periode Penilaian : NOV 2022

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
			50	60	70	80	90
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segara melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Merekomendasikan Foni Evi
Dongoran sebagai Pemenang
Terbaik Periode November 2022

Total Nilai : 1050



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : *Tokana Nurmalia Dewi BR Siantun, A.m.d.*
Jabatan/Bagian : *Administrasi Registrasi Perkara Pidana.*
Pendidikan : *D3*
Periode Penilaian : *Nov 2022*

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
			50	60	70	80	90
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segara melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Total nilai : 1040



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : *Roni Evi Dongeran, S.H.*
Jabatan/Bagian : *ANALIS PERKARA PERADILAN*
Pendidikan : *SARJANA HUKUM*
Periode Penilaian : *NOVEMBER 2022*

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segara melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Merekomendasikan Koni Evi
Dongoran sebagai Pegawai
Terbaik Periode Nov 2022

[Signature]
01/12/2022

Total nilai : 1050



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : *YOHANA NURMALA DEWI A,md.*
Jabatan/Bagian : *Registrasi Perkara / Pidana.*
Pendidikan : *D^{III}*
Periode Penilaian : *NOVEMBER 2022*

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab,kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas .	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Jumlah nilai = 1040



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : Roni Evi Dongoran
Jabatan/Bagian : Analis Perkar Pendidikan
Pendidikan : Sajana Hukum
Periode Penilaian : November 2022

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segara melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Mererekomendasikan Rani Evi sebagai pegawai terbaik November 2022.

Total Nilai : 1050



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : Yohana N-b Santuni
Jabatan/Bagian : Pengadministrasi Registrasi Perkara
Pendidikan : D-III
Periode Penilaian : November 2022

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
			50	60	70	80	90
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas .	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

Total Nilai = 1010



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : ROMI EUI DONGORAN
Jabatan/Bagian : ANALIS PERKARA PERADILAN
Pendidikan : SH
Periode Penilaian : NOVEMBER '22

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
			50	60	70	80	90
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

RANI EUI SEBAGAI PEGAWAI TERBAIK PERIODE NOV '22

TOTAL Nilai : 1060



**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PENGADILAN NEGERI KOBA PERIODE NOVEMBER 2022**

Nama : YDEIANA SIWUTRI, A.Md
Jabatan/Bagian : PRP
Pendidikan : D-III
Periode Penilaian : NOVEMBER 2022

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian				
1	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	50	60	70	80	90
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	50	60	70	80	90
2	Prestasi Kerja	Memiliki tanggung jawab, kecakapan serta kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.	50	60	70	80	90
		Memiliki semangat/ motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas.	50	60	70	80	90
3	Tanggung Jawab	Segara melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	50	60	70	80	90
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	50	60	70	80	90
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	50	60	70	80	90
4	Kejujuran	Memiliki Integritas tinggi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
5	Kerjasama	ringan tangan membantu teman satu tim dalam melaksanakan tugasnya	50	60	70	80	90

		Menghargai pendapat serta pekerjaan teman satu tim.	50	60	70	80	90
6	Kebersihan	Selalu berpenampilan bersih dan rapi dalam melaksanakan tugas	50	60	70	80	90
		Menjaga lingkungan pekerjaannya agar selalu bersih dan tertata dengan baik	50	60	70	80	90

Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan

Keterangan :

50 Sangat Kurang

60 Kurang

70 Cukup

80 Baik

90 Baik sekali

REKOMENDASI TIM PENILAI :

TOTAL NILAI : 100